

BAB IV

LANGKAH STRATEGI LUAR NEGERI AUSTRALIA MENGHADAPI SERANGAN DAN ANCAMAN SERANGAN TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Pemerintah Australia selain melakukan langkah strateginya di dalam negeri, juga melakukan penerapan langkah strategi luar negeri yang mendukung komitmennya dalam menghadapi serangan dan ancaman serangan terorisme terhadap kepentingan Australia di luar negeri.

Kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil adalah kepentingan strategis Australia sebagai kawasan yang bukan merupakan sumber ancaman keamanan Australia, atau sebagai wilayah untuk menjalankan kekuatan militer terhadap Australia. Asia Tenggara harus tetap stabil, dan reformasi-pemikiran cukup untuk mempertahankan tingkat pembangunan yang wajar. Kemungkinan krisis keuangan dan ekonomi global akan menimpa negara-negara di kawasan yang berdampak pada stabilitas politik di regional dengan tingkat yang bervariasi.

Kawasan Asia Tenggara telah menjadi *land scape* bagi politik internasional, sehingga hampir pada setiap kebijakan internasional kawasan Asia Tenggara selalu dilibatkan. Beberapa lembaga penelitian dunia mengungkapkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan sebagai sasaran aksi terorisme, hal ini terjadi karena banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan standar ganda yaitu memerangi terorisme namun juga terkadang melemahkan komunitas yang termarginalisasi. Bentuk ketidak-adilan inilah yang akan menjadi faktor pemicu (*Trigger Factor*) bagi terciptanya aksi-aksi terorisme

di kawasan Asia Tenggara.¹ Selain itu negara-negara di kawasan ini masih memiliki permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memicu terorisme.² Terorisme umumnya terkait dengan negara-negara dengan pembangunan ekonomi tingkat menengah, sering muncul dalam masyarakat dengan modernisasi yang cepat dan transisi.³

Usaha berbagai pihak untuk memahami akar penyebab (*root causes*) dari terorisme umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*) dan kesenjangan (*inequality*) merupakan persoalan paling mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memerangi terorisme. Lebih jauh, fenomena globalisasi juga disebut sebagai faktor pemicu terorisme. Alasannya adalah karena globalisasi diyakini ikut menjadi faktor signifikan dalam terjadinya kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan global.⁴

Mitra keberhasilan integrasi di dalam ekonomi global adalah pertumbuhan golongan 'globalisers lemah' yang kurang kompetitif, mereka yang pendapatan penduduknya menurun atau stagnan, dan akibatnya adalah meningkatnya pengangguran, ketegangan politik, dan fundamentalisme agama. Tumbuhnya

¹ "Tantangan ARF Mendatang", *Kompas*, 25 Juni 2004.

² <http://jakarta45.wordpress.com/2009/07/20/setidaknya-ada-5-biang-penyebab-terjadinya-terroris/>

³ *Psychology of Terrorism*, Randy Borum, 2003

⁴ Philips J. Vermonte, *Menyoal Globalisasi dan Terorisme*, 2003

ketimpangan sosial tersebut mengakibatkan pembenaran tindakan teroris oleh para pelaku dalam nama distribusi yang lebih adil untuk kesejahteraan.⁵

Tindakan *Counter-Terrorisme* di Asia Tenggara akan membatasi perluasan jaringan ekstremis lokal, namun kewaspadaan diperlukan selama bertahun-tahun sebelum ancaman tersebut dinyatakan telah berkurang ke tingkat yang tidak mengkhawatirkan. Risiko serangan teroris di Asia Tenggara yang berpotensi mempengaruhi kepentingan Australia, atau mengancam Australia, akan tetap menjadi perhatian di masa mendatang.⁶

Kepentingan dalam konteks internal atas kerjasama Australia dan Indonesia dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia adalah kepentingan yang dicapai dalam lingkup kepentingan luar negeri, kepentingan tersebut antara lain untuk mewujudkan stabilitas keamanan regional, bukan hanya sebagai upaya menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai wilayah bebas ancaman terorisme, namun juga mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi karena perbedaan kultur.

Kerjasama Australia dengan Indonesia dalam rangka penanganan kasus terorisme di Indonesia, juga terbukti efektif mereduksi perbedaan, dalam hal ini Australia dengan negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Dengan upaya kerjasama Australia dan Indonesia dalam rangka menangani kasus terorisme bersama, maka akan terbentuk standar bersama yang efektif dan efisien dan lebih normatif dalam upaya mewujudkan stabilitas kawasan / regional Asia-

⁵ Addressing the Causes of Terrorism, The Club Madrid Series..., 2005, hal. 22

⁶ Defending Australia in The Asia Pasific Century: Force 2030, Australia Defence White Paper, Commonwealth Australlia 2009, www.defence.gov.au

Pasifik yang bebas dari ancaman terorisme. Konsep kerjasama ini disebutkan oleh K.J. Holsti sebagai berikut:⁷

“Sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dari banyak kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menolong permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan dari beberapa pihak. Proses ini biasanya disebut kerjasama (*collaboration*).”

Konsep ini dapat dipakai untuk menerangkan bagaimana suatu pola kerjasama antar negara itu terjadi, yang mana dalam hal ini adalah kerjasama Australia dengan negara-negara lain. Pola kerjasama itu terjadi karena dalam hubungan antar negara terdapat suatu sifat saling ketergantungan. Sifat tersebut terjadi baik pada bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Suatu negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain yang dianggap mampu membantu dan dapat saling menguntungkan. Kerjasama yang dijalin biasanya dilakukan dengan negara-negara yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama.

Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina bekerja sama untuk memerangi terorisme di Asia Tenggara, dan Australia tahu bahwa pemerintah negara-negara saja tidak bisa menyelesaikan masalah terorisme. Maka Australia

⁷ Holsti, K.J., *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 650

memiliki minat yang kuat dalam memaksimalkan pengaruhnya dan upaya membantu negara-negara tersebut. Kebijakan Australia bertujuan untuk menegosiasikan perjanjian kontra-terorisme dengan negara-negara Asia Tenggara dan memperdalam hubungan antara badan-badan intelijen dan pasukan polisi.⁸

Langkah strategi luar negeri Australia di kawasan Asia Tenggara yaitu pembangunan ekonomi luar negeri pemerintah Australia untuk negara berkembang dan pembangunan sistem kontra terorisme pemerintah Australia di luar Australia.

A. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI LUAR NEGERI PEMERINTAH AUSTRALIA UNTUK NEGARA BERKEMBANG

Pemerintah Australia mengambil strategi program bantuan pembangunan luar negeri dengan Indonesia sebagai langkah memerangi akar penyebab terorisme, yaitu kemiskinan, kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi.

1. Kerjasama Bilateral Program Bantuan Pembangunan Luar Negeri Pemerintah Australia Untuk Indonesia⁹

Pemerintah Australia mengambil langkah strategi program bantuan pembangunan luar negeri dengan Indonesia sebagai langkah memerangi akar penyebab terorisme.

Program ini merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Program ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia. Program

⁸ <http://www.thefreelibrary.com/Australia%27s+response+to+terrorism+in+the+Asian+region.-a0155873240>

⁹ <http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html>

bantuan Australia untuk Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan. Program ini adalah program antar Pemerintah (G to G), dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra utama AusAID.

Program ini menggunakan berbagai pendekatan pelaksanaan. AusAID memiliki proyek-proyek bilateral dan juga menyalurkan dana melalui badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa, Lembaga Keuangan Internasional (IFI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional (INGO). AusAID juga mendukung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan berbagai kelompok masyarakat lain. Semua kegiatan program membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia.

Mulai 1 Mei 2006, program bantuan bilateral Australia di Indonesia akan dipromosikan dengan nama Kemitraan Australia Indonesia (*Australia Indonesia Partnership* atau AIP): program bantuan Pemerintah Australia secara keseluruhan dengan anggaran pengeluaran sekitar A\$2 milyar untuk jangka waktu lima tahun. Program ini mencakup paket Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD) bernilai A\$1 milyar, satu-satunya paket bantuan terbesar dalam sejarah Australia.

Strategi Kerjasama Pembangunan Australia di Indonesia

Tujuan jangka panjang program kerjasama pembangunan Australia dengan Indonesia adalah untuk membantu tercapainya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, melalui:

- Dukungan untuk memperbaiki manajemen ekonomi dengan membantu langkah-langkah utama reformasi struktural
- Dukungan untuk memperkuat institusi dan pelaksanaan demokrasi dengan membantu reformasi hukum dan keadilan, serta institusi demokrasi
- Meningkatkan keamanan dan stabilitas melalui dukungan untuk counter-terorisme, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan
- Membantu peningkatan akses dan mutu pelayanan publik dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Untuk merespon berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk jangka menengah dan dalam rangka membantu kepentingan nasional Australia, program bantuan pembangunan akan:

- Melanjutkan perluasan bantuan kepada pemerintahan dengan mendukung reformasi ekonomi, hukum dan keadilan; promosi dan proteksi hak-hak azasi; serta bantuan berkelanjutan untuk kegiatan counter-terorisme
- Meningkatkan dampak program-program berfokus kemiskinan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan pendidikan, kesehatan, dan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Kemitraan Australia Indonesia mencerminkan kepentingan nasional Australia dalam mendukung stabilitas dan kemakmuran Indonesia dengan membantu Indonesia meningkatkan pemerintahan, dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Kemiskinan di Indonesia terpusat di golongan penduduk tanpa pendidikan atau pendidikan formal yang minim. Program besar pendidikan dasar sedang

diimplementasikan untuk mendukung terciptanya sistem pendidikan dengan sumber daya terintegrasi.

Australia melanjutkan dukungan bagi demokrasi di Indonesia melalui perluasan program bantuan reformasi hukum dan hak azasi yang berpusat pada reformasi keadilan; promosi dan proteksi hak azasi dan akuntabilitas publik; proses dan institusi pemilu dan parlemen; serta bantuan bagi organisasi masyarakat hukum dan tindakan anti korupsi.

Program-program pembangunan tetap melanjutkan dukungan bagi langkah-langkah reformasi ekonomi. Termasuk restrukturisasi dan pengawasan sektor keuangan, manajemen hutang, peningkatan pemasukan kas negara, dan peningkatan kapasitas audit. Program yang didasarkan pada bantuan yang telah berjalan untuk pusat manajemen obligasi Pemerintah, meneruskan bantuan bagi kantor pajak Indonesia dalam mengintegrasikan dan memperbaiki proses-proses, dan membantu proses restrukturisasi besar di Kementerian Keuangan Indonesia.

Pendekatan terintegrasi bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia juga telah diterapkan. Termasuk membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan pendekatan baru dalam pengentasan kemiskinan, dan pemerintahan tingkat distrik yang lebih baik.

Strategi AIP bertujuan untuk mendukung secara strategis pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia. Sasarannya adalah agar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dapat bermitra dalam upaya mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, demokratis dan aman, dengan melaksanakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia. Pilar-pilar utama Strategi ini adalah:¹⁰

- Pilar 1 Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi
- Pilar 2 Investasi untuk pembangunan manusia
- Pilar 3 Demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik
- Pilar 4 Keamanan dan kedamaian

a. Pilar 1 : Pertumbuhan Yang Berkelanjutan Dan Manajemen Ekonomi

Australia akan bekerjasama dengan Indonesia untuk menghasilkan:

- Manajemen sumber daya alam dan tanggap terhadap perubahan iklim yang lebih baik.
- Kebijakan ekonomi yang lebih baik dan manajemen ekonomi yang lebih kokoh di tingkat pusat.
- Mengurangi hambatan-hambatan dalam pengembangan prasarana dan produktivitas.

Pilar 1 adalah dasar dari AIP. Pilar ini sangat menekankan pentingnya membantu Indonesia mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui manajemen sumber daya dan ekonomi yang lebih baik. Bila memungkinkan, program-program ini akan dilengkapi dengan kerjasama ilmiah dan teknis antara badan-badan Australia dan Indonesia yang terkait.

Usaha ini akan melibatkan program-program di berbagai bidang, seperti perubahan iklim dan lingkungan (termasuk kesehatan hewan dan kesuburan tumbuhan serta biosafety); infrastruktur; produktivitas daerah pedesaan; dan

¹⁰ <http://www.indo.usaid.gov.au/bi/docs/AIP-countrystrat%2008-13-indo.pdf>

manajemen ekonomi. Australia juga akan mendukung organisasi-organisasi regional yang kuat (seperti ASEAN – *Association of Southeast Asian Nations* dan APEC – *forum Asia Pacific Economic Cooperation*) dan membantu Indonesia agar lebih berperan, sehingga mampu memetik manfaat ekonomi dari kolaborasi regional.

1) Infrastruktur

▪ Meningkatkan Infrastruktur Jalan Raya

Australia bekerja sama dengan Indonesia untuk meningkatkan bagian penting dari jaringan jalan nasional, yang dianggap salah satu yang paling berbahaya di dunia. Melalui pinjaman bebas bunga, Australia mendanai 20 proyek di sembilan provinsi untuk memperbaiki sekitar 400 kilometer jalan dan 1.300 meter jembatan di seluruh Indonesia timur

▪ Memperbaiki sistem air dan sanitasi

Australia berkomitmen membantu Indonesia mencapai tujuannya untuk mengurangi separuh jumlah penduduk Indonesia yang hidup tanpa akses ke air minum yang bersih pada tahun 2015. Kedua negara bekerja sama untuk meningkatkan akses ke pasokan air yang handal dan berkelanjutan dan layanan sanitasi, khususnya bagi masyarakat miskin.

▪ Mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan

Australia juga bekerja sama dengan Indonesia untuk memperbaiki kebijakan infrastruktur, perencanaan dan lingkungan investasi. Salah satu masalah terbesar adalah iklim investasi yang buruk untuk kemitraan sektor swasta dan persiapan proyek yang tidak memadai dan desain. Mengatasi korupsi dan / atau

proses tidak efektif dalam pengadaan, perencanaan dan pengawasan juga penting. Dukungan Australia termasuk bekerja sama dengan Departemen untuk mengembangkan pedoman baru dan prosedur untuk sistem manajemen transportasi yang lebih baik, hibah untuk pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam air dan utilitas sanitasi dan pengembangan rencana induk nasional untuk pelabuhan dan kereta api. Dukungan Australia untuk sektor ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari peningkatan infrastruktur menjangkau masyarakat di daerah miskin dan lebih terisolasi di Indonesia.

2) Desentralisasi

Sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia tidak mengalami kekurangan anggaran dalam memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Berbagai kemajuan telah dicapai, tetapi dengan populasi sekitar 230 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Satu masalah besar diantaranya adalah pengalokasian dan penggunaan sumber daya yang seringkali tidak efektif, yang menghambat peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.

Australia mendukung agenda desentralisasi pemerintah Indonesia melalui program-program yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik untuk memperbaiki pelayanan publik, dan mendukung masyarakat sipil untuk mempengaruhi prioritas pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan.

- Dukungan kepada pemerintah pusat dan daerah

Australia membantu Indonesia dalam meningkatkan keahlian pemerintah daerah, sehingga mereka dapat mengelola sumber daya yang tersedia secara lebih baik dan dapat memberikan pelayanan publik dengan lebih baik.

▪ Dukungan kepada masyarakat sipil

Australia mendukung kelompok-kelompok masyarakat sipil Indonesia sehingga mereka bisa bekerja sama dengan para pembuat kebijakan dan masyarakat untuk menghasilkan peraturan/perundang-undangan dan pelayanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan peraturan/perundang-undangan Indonesia, hal ini dilakukan dengan cara mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pemerintah, dan mendukung masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi tentang anggaran pemerintah dan kewajiban-kewajiban pelayanan publik.

▪ Bantuan Australia untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (PNPM)

Pada Bulan Maret 2010 Pemerintah Australia mengumumkan sebuah paket bantuan senilai A\$215 juta untuk membantu program nasional pengentasan kemiskinan - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Kontribusi untuk PNPM menjadikan Australia sebagai donor bilateral terbesar untuk program ini. Terdapat hampir separuh total penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan US\$ 2 per hari, atau bahkan kurang dari itu. Pemerintah Australia berkomitmen untuk bekerja dengan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

PNPM dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 berdasarkan pengalaman proyek pembangunan berbasis masyarakat selama sepuluh tahun. Program ini telah bekerja di 60,000 pedesaan dan perkotaan, dan pada akhir tahun 2010 direncanakan akan mencakup 80,000 desa di Indonesia, serta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi 35 juta masyarakat miskin di Indonesia.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini diikutsertakan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mereka menentukan prioritas lokal masing-masing, menjalankan proyek-proyek, mengatur dana dan bertanggung jawab atas keberlangsungan program.

Berkat dukungan program ini masyarakat telah dapat membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem pengairan dan sanitasi. Mereka juga telah mendirikan skema kredit mikro untuk masyarakat dan berinvestasi di proyek-proyek kesehatan, pendidikan, dan pertanian. PNPM telah berperan penting pada saat rekonstruksi pasca tsunami di Aceh dan Nias, dan dalam meningkatkan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Program ini juga menargetkan isu-isu lingkungan dan manajemen sumber daya alam. PNPM pun mengikutsertakan kelompok-kelompok rentan, seperti para perempuan kepala keluarga.

PNPM telah membantu membawa banyak keluarga keluar dari kemiskinan. Program ini telah menciptakan banyak lapangan kerja dan memberikan pinjaman kepada pedagang kecil dan usaha yang berbasis dari rumah. PNPM

juga telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan penting seperti pasar, pusat kota, ketersediaan air bersih dan fasilitas pendidikan.

Bantuan Australia akan membantu mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kehidupan masyarakat di Indonesia. Bantuan Australia akan:

- Membantu Indonesia mengatur dan melaksanakan PNPM skala nasional dengan lebih baik pada semua tingkat pemerintahan.
- Memperbaiki pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui bantuan kepada sub-program PNPM seperti PNPM Generasi. Sub-program ini akan memperbaiki kesehatan ibu dan anak dan menyediakan materi pendidikan kepada masyarakat serta insentif bagi guru-guru dan anak-anak agar tetap bersekolah.
- Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk mengakses skema keuangan mikro yang berkesinambungan demi memperbaiki kehidupannya.

Dengan dikepalai oleh Pemerintah Indonesia, PNPM didukung oleh beberapa donor internasional, termasuk Australia. Australia dan Indonesia bekerja dengan erat untuk memastikan bantuan Australia dapat memberikan dampak yang besar, dan melengkapi aktivitas PNPM dengan donor lain.

Tambahan Program Nasional Untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MANDIRI) merupakan program Pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan peluang kerja. Program ini berfokus pada serta mengkoordinasikan

kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat dan akan mencakup 75,000 desa, dengan anggaran pemerintah sebesar US\$800 juta per tahun untuk mengurangi tingkat pengangguran perempuan dan laki-laki.

PNPM-MANDIRI terkait dengan dukungan banyak donor, juga dukungan dari beberapa program AIP. Australia telah bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mendukung program ini sebagai jalan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat secara efektif melalui pendekatan program terkoordinasi yang dipimpin oleh Indonesia.

Australia telah memberikan sumbangan langsung yang nyata dan berusaha untuk lebih memadukan kegiatan-kegiatan AIP masyarakat dengan PNPM-MANDIRI.

Australia akan mencari cara yang efektif untuk mendukung Indonesia dan memperluas kontribusi AIP kepada PNPM-MANDIRI, mengingat program ini mengusahakan terciptanya peluang kerja, pemerintahan ekonomi yang berpusat pada masyarakat, sumber energi yang dapat diperbaharui (micro-hydro), ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berbasis masyarakat, dan mendorong kesetaraan gender

3) Gender

▪ Kesetaraan Gender dan Pembangunan

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi individual mereka, untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi negara, dan untuk mendapatkan keuntungan yang sama dari partisipasi mereka di masyarakat.

▪ Gender dalam program bantuan Australia di Indonesia

Bantuan pembangunan Australia untuk Indonesia menyadari bahwa baik pria maupun wanita memiliki peran di semua aspek pembangunan. Bantuan Australia pada Indonesia bertujuan untuk:

- Meningkatkan status ekonomi kaum wanita.
- Mendorong partisipasi yang setara dari perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan
- Meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan yang layak untuk kaum wanita, pria, anak laki-laki dan perempuan.

b. Pilar 2 : Investasi Untuk Pembangunan Manusia

Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memberikan:

- Mutu, akses dan penanganan pendidikan yang lebih baik.
- Akses dan sistem kesehatan yang lebih baik.

AusAID memberikan bantuan pembangunan di sejumlah sektor perekonomian Indonesia. Sektor-sektor tersebut adalah:

1) Pendidikan dan Beasiswa

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan adalah hak asasi dasar manusia. Namun masih banyak anak yang kehilangan kesempatan mendapat pendidikan - baik karena mereka tidak mampu bersekolah, tempat tinggal yang jauh atau karena tekanan untuk bekerja pada usia muda belia.

Australia mendukung komitmen Indonesia untuk menyediakan akses untuk pendidikan yang berkualitas bagi semua anak. Bantuan Australia beragam,

dari pendidikan dasar hingga pelatihan ketrampilan kejuruan dan meningkatkan kualifikasi tingkat perguruan tinggi. Yang dilakukan Australia antara lain:

- **Pembangunan sekolah-sekolah**

Australia telah membangun lebih dari 2,000 sekolah tingkat menengah pertama di berbagai daerah di Indonesia guna membantu meningkatkan akses pendidikan.

- **Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Australia membantu Indonesia meningkatkan sistem pendidikan. Ini termasuk mengembangkan ketrampilan guru dalam mengajar dan kemampuan orang tua untuk membantu pendidikan anak-anak mereka. Australia juga bekerjasama dengan kepala sekolah untuk mengembangkan ketrampilan manajemen mereka beserta pejabat pendidikan disekitar 34 provinsi untuk lebih baik mengelola dana pendidikan mereka.

- **Peningkatan Madrasah**

Australia juga turut mengembangkan kualitas pendidikan sekolah madrasah di Indonesia. Sekolah berbasis agama merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia.

- **Peningkatan Kesetaraan Jender**

Bantuan Australia untuk sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk secara adil memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam hal memberikan kesempatan yang sama untuk bersekolah; menciptakan lingkungan sekolah yang ramah; dan memastikan bahan-bahan pelajaran yang peka jender.

- **Pemberian Beasiswa**

Australia setiap tahunnya memberikan lebih dari 300 beasiswa untuk warga Indonesia melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Australia. Ini membantu pembangunan sumber daya Indonesia dan memperkuat hubungan persaudaraan antara kedua negara. Melalui *The Australia Awards*, beasiswa diberikan pada daerah yang berkembang yang telah disepakati oleh Australia dan Indonesia dan mencakup bidang studi kesehatan, pendidikan, reformasi demokrasi, tata kelola yang baik, penanggulangan dan tanggap bencana dan pengelolaan sektor umum.

- **Kemitraan dan Kegiatan Bantuan**

Program-program pendidikan Australia yang terakhir di Aceh, Papua dan Sumatera Barat memiliki perjanjian pembiayaan bersama dengan mitra-mitra kunci pendidikan termasuk Uni Eropa, Kerajaan Belanda, USAID, Bank Dunia dan UNICEF. Belakangan ini, Australia juga memimpin Kelompok Kerja Sektor Pendidikan, sebuah forum yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, yang berfokus pada kebijakan pendidikan.

2) Kesehatan

Australia bekerja sama dengan Indonesia untuk menyediakan kebutuhan kesehatan perempuan dan anak; mengatasi HIV, malaria dan penyakit menular, serta memperkuat sistem kesehatan.

- **Penguatan Sistem Kesehatan**

Australia membantu Indonesia meningkatkan sistem kesehatan dengan memperkuat kebijakan kesehatan masyarakat, perencanaan, dan penganggaran untuk jangka panjang.

- **Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi baru Lahir**

Australia mendukung upaya Indonesia untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, penyediaan sarana kesehatan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak.

- **Penanggulangan epidemi HIV dan AIDS**

Selama lebih dari 12 tahun, Australia telah memegang peranan penting dalam membantu Indonesia menanggulangi permasalahan HIV dan AIDS dimana bertujuan untuk memperbaiki kondisi hidup orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari permasalahan HIV dan AIDS.

- **Menghadapi Penyakit menular dan pandemik**

Australia telah mengantisipasi untuk membantu mengatasi masalah Penyakit Menular yang baru Muncul (*Emerging Infectious Diseases*) di Indonesia. Australia adalah salah satu negara yang pertama memberi dukungan kepada Indonesia dalam menanggapi wabah Flu Burung. Australia juga membantu Indonesia dalam menghadapi wabah rabies di Bali pada tahun 2008. Australia bekerjasama dengan Indonesia agar sistim kesehatan dapat menanggapi secara efektif terhadap wabah penyakit. Bantuan ini berfokus pada penurunan dampak dari penyakit tersebut terhadap kesehatan manusia dan perkembangan perekonomian Indonesia.

c. Pilar 3: Demokrasi, Keadilan Dan Pemerintahan Yang Baik

Australia akan bekerjasama dengan Indonesia untuk memberikan:

- Kapasitas, akuntabilitas dan daya tanggap yang lebih kuat terkait lembaga-lembaga serta proses hukum, demokrasi dan pengawasan.
- Pemerintah daerah dan manajemen keuangan publik yang lebih baik, sesuai dengan permintaan daerah.

Indonesia terus mengkonsolidasikan proses demokrasinya dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahnya. Meskipun kemajuan telah terjadi sejak transisi menuju demokrasi di tahun 1999, kualitas dari lembaga-lembaga demokrasi publik dan akuntabilitasnya masih harus ditingkatkan.

Pemerintahan Demokratis

Tata pemerintahan yang baik adalah sebuah blok bangunan fundamental bagi pembangunan. Penguatan tata kelola akan membantu Indonesia mencapai pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran nasional, dan kegiatan tersebut menjadi prioritas untuk AusAID.

Australia bekerja dengan perencanaan ekonomi dan lembaga keuangan untuk mendukung tujuan Pemerintah Indonesia terhadap kesinambungan fiskal, sektor keuangan yang kuat dan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan teknis, pengembangan kapasitas dan mengembangkan kemitraan pemerintah-ke-pemerintah (G to G). Program berfokus pada administrasi pajak, pengelolaan hutang, peraturan sektor keuangan dan pengawasan, dan kebijakan perdagangan internasional.

Di sektor reformasi hukum, Australia membantu badan-badan Pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga hukum dan peradilan dan organisasi hak-fokus hukum dan manusia di empat bidang utama: anti-korupsi, akses terhadap keadilan, kejahatan lintas-nasional dan hak asasi manusia.

Australia juga mendukung sektor publik Pemerintah Indonesia agenda reformasi, serta kerja organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mendorong pengembangan masyarakat dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sipil yang dinamis di Indonesia.

- Penguatan supremasi hukum, akses terhadap keadilan dan menghormati hak asasi manusia

Australia telah memberikan dukungan dengan hukum Indonesia dan sektor peradilan selama lebih dari 10 tahun. Tujuan utama Australia adalah untuk meningkatkan hak asasi manusia dan mendukung pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan merata.

- Mendukung pemilu yang demokratis

Australia telah mendukung tiga pemilu nasional (1999, 2004 dan 2009) dan daerah pemilihan selama masa transisi Indonesia yang demokratis.

d. Pilar 4: Keamanan Dan Kedamaian

Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memberikan:

- Respon yang lebih baik atas kebutuhan kemanusiaan, keadaan darurat dan kerentanan terhadap bencana alam

- Kapasitas yang lebih baik dalam memastikan keselamatan dan keamanan transportasi dan dalam menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas negara.

Tingkat keamanan dan stabilitas Indonesia berkaitan erat dengan pembangunan ekonominya. Pertumbuhan kedua unsur di atas sempat terganggu akibat dari serangan teroris (seperti Bom Bali), gerakan separatis di Aceh dan ancaman-ancaman lintas batas yang berasal dari perpindahan manusia. Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai bencana alam berskala besar yang mengancam keselamatan banyak orang.

Melalui Pilar 4, Australia bermaksud membantu Indonesia meningkatkan kemampuannya dalam merespon, mempercepat pemulihan dan serta mengurangi kerentanan Indonesia atas dari situasi-situasi tersebut.

Membantu Indonesia meningkatkan keselamatan transportasi dan memerangi kejahatan lintas negara adalah salah satu bidang yang akan menjadi kunci kerjasama dan kemitraan jangka panjang. Departemen-departemen dan badan-badan khusus Pemerintah Australia akan terus menyediakan bantuan yang praktis dan tepat sasaran guna meningkatkan kemampuan penegakan hukum di Indonesia, menghadapi terorisme, dan membantu lembaga-lembaga perhubungan dan pengawasan perbatasan sehingga mereka bisa menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas negara dan meningkatkan standar keselamatan.

Setelah Bom Bali di tahun 2002 dan 2005, Polisi Federal Australia mempererat kerjasamanya dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan membantu pembentukan Pusat Koordinasi Kejahatan Lintas Negara dan Pusat Kerjasama

Penegakan Hukum Jakarta. Kemitraan antara Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia dengan pihak berwenang di Indonesia akan terus meningkatkan kemampuan di bidang-bidang seperti manajemen perbatasan dan sistem peringatan. Program-program yang dijalankan melalui Departemen Pembangunan Infrastruktur, Transport, Regional Australia dan pemerintah provinsi dan kabupaten Indonesia akan mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan standar keselamatan dan keamanan transportasi, baik di udara maupun di laut.

Australia juga berkomitmen membentuk kerjasama yang erat dengan Indonesia dalam hal mencari solusi jangka panjang untuk masalah penangkapan ikan ilegal baik di kawasan perairan utara Australia maupun di perairan lain di kawasan Asia. Solusi ini akan dicapai melalui program-program yang dapat membantu pengentasan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan masyarakat secara menyeluruh, dan membuka peluang kerja, termasuk dalam lingkungan masyarakat nelayan. Australia juga akan membantu memerangi penyelundupan manusia, sebagai salah satu bentuk usaha menghadapi masalah lintas batas, dengan bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Membangun Kemampuan Kontra Terorisme Indonesia

Setelah peristiwa pemboman Bali I pada tahun 2002, Perdana Menteri Australia mengumumkan US\$ 10 juta, untuk empat tahun membangun kemampuan Inisiatif kontra terorisme dengan tiga prioritas yang luas untuk bantuan: membatasi aliran pembiayaan kepada teroris, meningkatkan keamanan

perjalanan dengan memperkuat bandara, imigrasi dan bea cukai kontrol kemampuan, dan membangun kapasitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada kontra-terorisme dan kejahatan transnasional.

Australia telah menyediakan bantuan yang cukup besar bagi Indonesia untuk memperkuat rezim anti pencucian uang selama beberapa tahun. Melalui inisiatif Perdana Menteri, bantuan sedang dikonsolidasikan dan diperpanjang untuk membendung aliran pembiayaan kepada teroris, termasuk dengan mendukung pembentukan dan pengoperasian unit intelijen keuangan Indonesia yang efektif, PPATK.

AusAID mendukung berbagai upaya bantuan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kontra-terorisme dari lembaga kunci Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan pergerakan orang dan barang di seluruh perbatasan Indonesia. *Australian Federal Police* (AFP) telah memulai program untuk membangun keterampilan kontra-terorisme Kepolisian Indonesia. Program ini melibatkan pengiriman sejumlah pelatihan, dukungan kelembagaan untuk pembentukan *Transnasional Crime Centre* (TNCC) dan pengembangan sistem informasi manajemen kasus.

Pencapaian / hasil:

- Dukungan untuk keberhasilan pembentukan PPATK, unit intelijen keuangan Indonesia.
- Lebih dari 100 staf POLRI terlatih dalam analisis intelijen dan teknik pengawasan.
- Pengembangan dan roll-out database nasional pertama POLRI, Manajemen

Kasus dan Sistem Informasi.

- Pembentukan TNCC POLRI, yang terletak di Markas Besar Polri di Jakarta.
- Tenaga Bea Cukai terlatih dalam keterampilan pencarian kapal dan analisa intelijen.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN SISTEM KONTRA TERORISME

PEMERINTAH AUSTRALIA DI LUAR AUSTRALIA

Strategi-strategi ini diambil dalam upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional Australia serta mengatasi masalah serangan dan ancaman serangan terorisme di kawasan Asia tenggara yaitu terorisme berdasarkan ideologi ekstrimisme dan radikalisme agama yang berkembang.

Australia sebagai sebuah negara di dunia internasional perlu untuk melakukan kerjasama-kerjasama. Pola kerjasama itu terjadi karena dalam hubungan antar negara terdapat suatu sifat saling ketergantungan. Kerjasama yang dijalin biasanya dilakukan dengan negara-negara yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama.

1. Kerjasama Bilateral Kontra Terorisme Australia Dengan Indonesia

a. Kerjasama Australia Dengan Indonesia Menuntaskan Kasus Bom Bali I¹¹

Serangan terorisme terhadap Australia terutama sekali terjadi di Indonesia, diantaranya peristiwa Bom Bali I (12 Oktober 2002), Bom JW Marriot (5 Agustus 2003), Bom Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta (9 September 2004),

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002

Bom Bali II (1 Oktober 2005) dan Bom Mega Kuningan JW Marriot dan Ritz Carlton (17 Juli 2009).

Kerjasama kedua negara, antara Australia dan Indonesia dilakukan untuk mengungkap dan menangkap para pelaku teror Bom Bali I yang menewaskan 88 orang warga negara australia.

Tim dari *Australia Federal Police* datang ke Bali untuk membantu penyelidikan kasus tersebut. Australia membantu mulai dari penyelidikan jenis bom, tes DNA serta evakuasi korban. Beberapa tersangka telah berhasil ditetapkan antara lain: Patek, Samudra, Imron, Wayan, Dulmatin, Idris, Amrozi dan Hambali.

Tersangka pelaku Bom Bali I antara lain:

- Abdul Goni, didakwa seumur hidup
- Abdul Hamid (kelompok Solo)
- Abdul Rauf (kelompok Serang)
- Abdul Aziz alias Imam Samudra, terpidana mati
- Achmad Roichan
- Ali Ghufron alias Mukhlas, terpidana mati
- Ali Imron alias Alik, didakwa seumur hidup
- Amrozi bin Nurhasyim alias Amrozi, terpidana mati
- Andi Hidayat (kelompok Serang)
- Andi Oktavia (kelompok Serang)
- Arnasan alias Jimi, tewas
- Bambang Setiono (kelompok Solo)

- Budi Wibowo (kelompok Solo)
- Dr Azahari alias Alan (tewas dalam penyeragaman oleh polisi di Kota Batu tanggal 9 November 2005)
- Dulmatin (tewas tanggal 9 Maret 2010)
- Feri alias Isa, meninggal dunia
- Herlambang (kelompok Solo)
- Hernianto (kelompok Solo)
- Idris alias Johni Hendrawan
- Junaedi (kelompok Serang)
- Makmuri (kelompok Solo)
- Mohammad Musafak (kelompok Solo)
- Mohammad Najib Nawawi (kelompok Solo)
- Umar Kecil alias Patek
- Utomo Pamungkas alias Mubarok, didakwa seumur hidup
- Zulkarnaen

Aksi-aksi terorisme melalui aksi peledakan bom marak terjadi di Indonesia, bukan hanya warga sipil yang dijadikan sasaran namun terkadang juga menggunakan instansi vital asing sebagai sasaran peledakan bom. Dari beberapa instansi asing tersebut diantaranya merupakan fasilitas asing Australia di Indonesia, antara lain Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 9 September 2004.

Aksi peledakan bom yang terbesar adalah aksi peledakan bom di Legian Kuta Bali tepatnya di Paddys Club pada Oktober 2002 yang dikenal dengan

kasus Bom Bali I dan peledakan bom di Java's dan Raja's Restaurant pada Oktober 2005 yang dikenal dengan kasus bom Bali II. Peristiwa ini disamping sudah memakan banyak korban ratusan orang Indonesia dan warga asing yang tidak terkait, terutama wisatawan Australia, sekaligus juga telah merusak keseluruhan citra pulau Bali sebagai tempat wisata yang sebelumnya dianggap paling aman dan indah oleh para wisatawan asing.¹²

Keberhasilan Pemerintah Indonesia dan dukungan negara-negara asing dalam pengungkapan kasus Bom Bali I merupakan prestasi cemerlang bagi momentum kerjasama Pemerintah Indonesia dan negara-negara tetangga dalam mengatasi kasus terorisme di Indonesia. Dengan alasan tersebut Indonesia terus berusaha meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan negara-negara lain termasuk Australia guna mengatasi aksi tindak terorisme, khususnya pada rentang tahun 2002 hingga 2005.¹³

b. Kerjasama Pemerintah Australia Dengan Pemerintah Indonesia Membangun *Trans National Crime Center (TNCC)* di Jakarta

Berangkat dari kepentingan bersama dalam menangani terorisme yang dianggap sebagai ancaman global, beberapa negara Asia Pasifik mengadakan pertemuan *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism* di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 4-5 Februari 2004. Pertemuan yang dihadiri 250 delegasi dari 26 negara Asia Pasifik itu sepakat membentuk pusat koordinasi penanggulangan kejahatan transnasional (*Transnational Crime Coordination Centre/TNCC*) di Indonesia.

¹² *Sinar Harapan*, 8 Desember 2003.

¹³ *The Jakarta Post*, 21 September 2001

Australia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia mendirikan Pusat Penanggulangan Kejahatan Trans Nasional (*Trans National Crime Center* atau TNCC) yang bermarkas di Jakarta pada 21 Januari 2004. TNCC ini sekaligus akan menjadi pusat pelatihan kerjasama antiteror yang bisa digunakan sesama negara ASEAN dan juga kesepakatan untuk memperkuat laboratorium forensik supaya bisa digunakan pula bagi negara-negara di kawasan ASEAN dalam penyelidikan dan penanganan masalah terorisme. TNCC ini nantinya akan diperluas menjadi lembaga kerjasama ditingkat Asia Pasifik.

- c. Kerjasama Pemerintah Australia Dengan Pemerintah Indonesia Membangun *Jakarta Center of Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) di Jakarta Dan Pusat Pelatihan Anti Teror (PLATINA) di Semarang

Dukungan Pemerintah Australia dalam kasus Bom Bali 12 Oktober 2002 berdampak bagi semakin eratnya bagi hubungan Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus-kasus terorisme. Salah satu bentuk peningkatan intensitas kerjasama antara lain melalui dukungannya bagi pembentukan PLATINA dan JCLEC.

Australia bekerjasama dengan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Regional Tingkat Menteri tentang Kontra-Terrorisme di Bali pada Februari 2004. Hasil dari konferensi tersebut adalah berdirinya *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) dan Pusat Pelatihan Anti Teror (Platina) yang diresmikan tanggal 3 Juli 2004.

JCLEC, atau Pusat Kerja Sama dalam Penegakan Hukum Jakarta dibangun di Semarang, fasilitas ini merupakan bagian dari Markas Besar (Mabes)

Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Kemudian, JCLEC langsung digunakan untuk mendidik perwira tinggi polisi di negara-negara Asia Pasifik dalam menangani kejahatan lintas negara.

JCLEC diperuntukkan khusus melatih polisi anti teror dari sisi analisis dan manajerial misalnya tentang investigasi, intelejen, penguasaan teknologi multi media, analisa data, forensik dan sebagainya. Sedangkan Platina, khusus untuk membekali peserta tentang *striking force* dilapangan seperti bagaimana mengatasi pembajakan atau terorisme di pesawat, di kereta api, kapal laut, hotel, hutan dan sebagainya.

Pada bulan Februari 2008, Perjanjian Lombok (Lombok Treaty) antara Australia dan Indonesia mulai berlaku penuh, menyediakan kerangka kerja bagi kerjasama bilateral penegakan hukum, khususnya terhadap perdagangan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, dan terorisme. Perjanjian itu menandai kelanjutan dari upaya Australia untuk membangun kemampuan polisi Indonesia, seperti Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta (JCLEC), yang memainkan peran penting dalam mendorong kerjasama antar instansi Asia Tenggara yang terlibat dalam kontra-terorisme, dimulainya bersama program pelatihan hukum pada bulan Juli, perpanjangan Nota Kesepahaman Terorisme (MOU), dan konsultasi kontra-terorisme perdana yang diselenggarakan pada bulan Mei 2008.

Perjanjian itu ditandai peningkatan kerjasama bilateral dalam penegakan hukum, pengawasan perbatasan, dan keamanan transportasi maritim, bantuan

hukum, pemantauan keuangan, pertahanan, dan pengelolaan kimia, biologi, ancaman radiologi teroris, dan nuklir.¹⁴

Pemerintah Australia berupaya membantu Indonesia (POLRI) dalam menangani kasus terorisme di Indonesia melalui *Australian Federal Police* (AFP), bahkan lebih dari itu Pemerintah Australia juga memberikan bantuan teknis dan non teknis, termasuk bantuan dana sebesar US\$10 juta terhadap Pemerintah Indonesia.¹⁵ Bantuan tersebut dituangkan dalam kebijakan AIDA (*Australia-Indonesia Development Area*) kebijakan ini ditanda tangani melalui *Joint Ministerial Statement on Counter Terorisme* oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha dengan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer.

PLATINA (Pusat Pelatihan Antiteror Internasional) merupakan lembaga penanganan anti teror negara-negara Asia-Pasifik, sebelumnya negara-negara Asia-Pasifik tidak mempunyai lembaga penanganan anti teror karena pusat anti terorisme hanya terdapat pada Pusat Pelatihan Anti Terorisme Asia di Bangkok Thailand. PLATINA merupakan pusat pelatihan anti teroris internasional satu-satunya di Kawasan Asia-Pasifik yang mempunyai sarana-prasarana anti terorisme standar internasional.

PLATINA merupakan lembaga anti teroris internasional yang terletak di Semarang Jawa Tengah, lokasinya tergabung dalam kompleks Bumi Bhayangkara Akademi Kepolisian. PLATINA diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 3 Juli 2004, pada gelombang angkatan pertama pusat pendidikan ini

¹⁴ <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac67f1a.html>

¹⁵ *Tempo*, 13 Oktober 2005.

diikuti perwakilan negara-negara Asia-Pasifik antara lain seluruh negara ASEAN, RRC, Fiji, Vanuatu, Timor Leste, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.¹⁶

PLATINA sebagai pusat pelatihan anti terorisme internasional dilengkapi oleh peralatan canggih, termasuk didalamnya simulasi pembajakan pesawat Boeing dan kereta api. Staf pengajar dari lembaga ini merupakan gabungan dari instruktur negara-negara Asia-Pasifik, termasuk didalamnya dari Amerika Serikat dan Inggris.¹⁷

Keberadaan JCLEC (*Jakarta Centre of Law Enforcement Corporations*) pada dasarnya hampir sama dengan PLATINA, lembaga ini difungsikan sebagai media dalam mendukung sistem informasi dan telekomunikasi, negara-negara Asia-Pasifik dalam rangka mengangani ancaman terorisme. Peran JCLEC menjadi penting karena didalamnya terdapat berbagai aspek dalam hal penanganan masalah-masalah lintas batas (transnasional), mencakup pencucian uang, penyelundupan senjata, pengiriman data rahasia dan aspek lainnya.

- Mendukung Pembentukan Satuan Khusus Anti Teror Di Kepolisian Indonesia (Detasemen Khusus 88)

Dalam rangka penanganan kasus-kasus terorisme yang marak terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui institusi Kepolisian menilai perlu dibentuknya satuan (korps) sebagai ujung tombak dalam penanganan terorisme. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang didukung oleh negara-negara sahabat, khususnya Pemerintah Australia membentuk satuan pasukan dengan nama Detasemen Khusus Anti Teror 88.

¹⁶ "PLATINA Sebagai Refleksi Anti terorisme Internasional", *Tempo*, 20 Juli 2004.

¹⁷ *Tempo*, *ibid.*

Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai "*Anti Teror Act*" (ATA).¹⁸

Detasemen Khusus 88 atau DELTA 88 merupakan satuan khusus yang berada dibawah operasional Direktorat Reserse Kriminal Markas Besar POLRI. Satuan ini dibentuk menggunakan angka 88 yang melambangkan jumlah warga Australia yang meninggal pada kasus Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, angka 88 melambangkan makna seperti borgol ataupun angka yang tidak terputus sebagai makna bahwa personel dari pasukan ini akan bekerja secara sistematis dan tidak terputus.¹⁹

Pasukan ini dibentuk dan didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Australia, pusat pelatihan dari satuan elite ini berada di 50 kilometer selatan Jakarta yaitu Megamendung, Jawa Barat. Detasemen 88 ini beranggotakan 400 personel pilihan yang dibekali kendaraan tempur COLT M-4, senapan serbu, Sniper Rifles dan beberapa peralatan khusus standar pasukan elite internasional. Bahkan dalam waktu dekat satuan khusus ini akan dibekali dengan pesawat

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88

¹⁹ "Indonesia Special Police Profile, Detachment 88", <http://www.indonesiaeliteforce.tripod.com.html>, diakses pada 22 April 2006

angkut berat C-130 Hercules, dalam rangka mengamankan wilayah Indonesia dari aksi-aksi terorisme.²⁰

- Operasi Densus 88²¹
- 9 November 2005 - Detasemen 88 Mabes Polri menyerbu kediaman buronan teroris Dr. Azahari di Kota Batu, Jawa Timur yang menyebabkan tewasnya buronan nomor satu di Indonesia dan Malaysia tersebut.
- 2 Januari 2007 - Detasemen 88 terlibat dalam operasi penangkapan 19 dari 29 orang warga Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang di Kecamatan Poso Kota. Tembak-menembak antar polisi dan warga pada peristiwa tersebut menewaskan seorang polisi dan sembilan warga sipil.
- 9 Juni 2007 - Yusron al Mahfud, tersangka jaringan teroris kelompok Abu Dujana, ditangkap di desa Kebarongan, Kemrajan, Banyumas, Jateng
- 8 Agustus 2009 - Menggerebek sebuah rumah di Jati Asih, Bekasi dan menewaskan 2 tersangka teroris
- 8 Agustus 2009 - Mengepung dan akhirnya menewaskan tersangka teroris di Temanggung.
- 17 September 2009 - Pengepungan teroris di Solo dan menewaskan 4 tersangka teroris salah satu diantaranya adalah Noordin Mohammed Top

Disamping Detasemen 88, dukungan Pemerintah Australia juga dijalankan terhadap Korps Gegana sebagai satuan utama dalam penjinak bom, hal ini dijalankan karena sebagian besar kasus terorisme yang terjadi di Indonesia

²⁰ *ibid.*

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88

sebagian besar merupakan kasus peledakan bom. Korps Gegana POLRI dibentuk pada tahun 1995, sebelumnya pasukan ini tergabung dalam Korps Brimob POLRI.

Peran Korps Gegana menjadi penting setelah maraknya aksi peledakan bom di Indonesia, satuan ini mempunyai tiga tugas pokok yaitu mengatasi kasus terorisme, SAR (*Search and Rescue*) dan penjanakan bahan peledak (Jihandak),

Korps Gegana memiliki kendaraan-kendaraan khusus, bantuan Amerika Serikat dan Australia diantaranya kendaran jenis taktis EOD (*Extra Ordinance Disposal*) dan Robot Khusus Penjinak Bom "Hobo". Komando operasional Korps Gegana berasal langsung dari Assistan Operasi Kapolri.²²

d. Kerjasama Australia Dengan Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Imigran Ilegal

Persoalan imigrasi ilegal telah menjadi agenda keamanan penting dalam politik internasional, tak terkecuali dalam hubungan Indonesia-Australia. Permasalahan imigran ilegal turut serta mewarnai dinamika hubungan bilateral keduanya. Persoalan keimigrasian Australia tetap merupakan masalah yang sensitif walaupun kebijakan White Policy telah dihapuskan, isu imigrasi ilegal menjadi isu politik yang paling krusial di dalam negeri Australia sendiri. Bagi Indonesia permasalahan imigrasi ilegal ini dapat menjadi krikil yang dapat mengganggu hubungan antar keduanya. Indonesia sampai batas tertentu dianggap sebagai korban atas berlangsungnya penyelundupan manusia ke Australia, hanya karena banyak dari mereka yang menggunakan Indonesia sebagai batu loncatan untuk masuki Australia. Oleh karena itu, tanpa kemampuan kedua negara tersebut

²² "Profil Gegana", <http://www.tempointeraktif.co.id.html>, diakses pada 22 November 2005.

untuk bekerja sama untuk mengatasi persoalan secara jernih, kepentingan hubungan dan kerjasama yang lebih luas justru akan dirugikan.²³

Dalam menanggulangi tantangan masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang kompleks, Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama lebih erat dalam kerangka Bali Process, dan secara bilateral dalam kerangka Traktat Lombok, termasuk melalui Kerangka Kerja Implementasi Untuk Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Orang dan Perdagangan Manusia. Dipahami juga bahwa kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan manusia dan perdagangan orang merupakan permasalahan regional yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak di kawasan, khususnya negara asal, negara transit dan negara tujuan, termasuk kerjasama erat dengan lembaga internasional yang terkait. Sebagai ketua bersama pertemuan Bali Process untuk penanggulangan Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Kejahatan Lintas Negara, kedua negara menggarisbawahi komitmen bersama untuk memajukan kerjasama, termasuk mengidentifikasi inisiatif baru dalam mendorong upaya-upaya regional menjadi lebih kuat dan efektif. Dalam kaitan ini, Indonesia dan Australia berharap untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri Bali Process di masa mendatang, dan melakukan pembahasan usulan Australia bagi sebuah kerangka perlindungan regional, yang akan menanggulangi permasalahan, termasuk pemrosesan, pengembalian, dan penempatan kembali.²⁴

²³ <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/publikasi?task=view&catid=2&id=104>

²⁴ <http://www.austembjak.or.id/jaktindonesian/PB2010.html>

Kementrian Hukum dan Ham Indonesia, sangat serius dalam menangani dan mencegah kaburnya imigran ilegal dari rumah detensi imigrasi (Rudenim) Jakarta. Setelah melakukan inspeksi mendadak Menkumham melakukan kerjasama dengan Menteri Imigrasi dan Kependudukan Pemerintah Australia Chris Bowen, Rabu pagi (13/10). Dalam pertemuan bilateral tersebut, menghasilkan pembahasan *Development Of Regional Framework For Iregular Migrants*, untuk menyampaikan ketentuan peraturan Dirjenim tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal dan memastikan *Standard Proceedur* dalam peraturan Dirjenim tahun 2010, sebagai bentuk panduan untuk melakukan manajemen terhadap keberadaan imigran ilegal.²⁵

Pada pertemuan ini, pihak Australia juga akan membahas mengenai rencana pembangunan *Regional Processing Center* di Dilli dan Timor Leste. Pemerintah Indonesia dan Australia juga membahas kerjasama dalam pembangunan karantina dan rumah detensi yang berdasarkan hasil *Working Group* ke 15 dan *technical cooperation*.

Kerjasama ini juga akan menitikberatkan penyelidikan dan penindakan keimigrasian untuk membangun tiga unit tempat penampungan para imigran ilegal berupa karantina dan rumah detensi. Kerjasama pemulangan para imigran ilegal yang dilakukan melalui mekanisme *Assisted Voluntary Return* (VAR) dan *Involuntary Returns* akan dibahas mengenai kasus imigran ilegal yang telah ditangani proses pemulangannya dan rencana pemulangan imigran ilegal tahun

²⁵ <http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/mengatasi-imigran-ilegal-menkumham-kerjasama-dengan-pemerintah-australia>

2010. Menteri Australia juga akan menggunakan program *resettlement* bagi para pengungsi yang diterima keberadaannya sebagai pengungsi Australia.

Kerjasama masalah imigrasi dengan Indonesia dinilai sangat penting oleh Australia dalam menangani masalah terorisme, mengingat arus pengungsi yang sebagian besar berasal dari negara-negara yang memiliki masalah konflik dan terkait masalah jaringan terorisme internasional. Seperti imigran yang berasal dari negara-negara seperti Afghanistan dan Irak.

2. Kerjasama Bilateral Australia dengan Pemerintah Filipina

Australia akan bekerjasama erat dengan memodernisasi kekuatan pertahanan di Filipina, di mana akan terus memiliki kepentingan dalam membantu mengembangkan kemampuan anti-terorisme mereka, dan profesionalisme angkatan bersenjata mereka ketika menghadapi tantangan keamanan internal yang berat.

Australia dan Filipina mengadakan konsultasi tingkat tinggi kontra-terorisme, yang meninjau pembangunan kemampuan dan kolaborasi operasional, dan menyetujui prioritas yang luas dan arah untuk kerjasama masa depan. Hal ini sejalan dalam mengatasi serangan dan ancaman serangan terorisme di Asia Tenggara yang berasal dari kelompok yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda.

3. Kerjasama Multilateral Australia Dengan Negara-Negara Di Kawasan Asia Tenggara Di Dalam SEACT (*South East Asia Counter Terrorism*)

Selain dengan Indonesia, Australia juga menandatangani kerjasama MoU (Memoranda of Understanding) dengan sembilan negara lainnya dalam rangka memerangi terorisme di kawasan ini. Negara-negara tersebut antara lain Filipina,

Thailand, Malaysia, Brunei, Kamboja, Papua Nugini, India, Timor Leste dan Fiji. Hal tersebut dilakukan diantaranya untuk mengamankan perbatasan, kerjasama penegakan hukum serta kerjasama intelijen.

Berkaitan masalah terorisme, kerjasama secara intensif dilakukan dengan berbagi informasi dan data intelijen, pelatihan-pelatihan, latihan bersama penanganan pembajakan serta pembebasan sandera, dan langkah-langkah inisiatif seperti seminar manajemen konsekuensi, perintah dan kontrol.

Australia melanjutkan keterlibatan multilateral dengan bekerjasama dalam forum-forum internasional, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Di tingkat kawasan Asia Tenggara, Australia turut bekerjasama dengan negara-negara ASEAN yang tergabung dalam SEACT (*South East Asia Counter Terrorism*). Kerjasama yang dilakukan meliputi pertukaran informasi seputar isu terorisme.

Australia juga akan terus membantu negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk mengembangkan kapasitas yang lebih besar untuk berkontribusi terhadap keamanan regional.